

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Manfaatkan Lahan Milik DKI

SEKRETARIS Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengkritisi pemilihan lahan depo kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Ancol Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Dibanding membeli lahan senilai Rp 1,5 triliun, Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan, sebaiknya MRT memanfaatkan lahan milik Pemprov DKI Jakarta hasil perluasan di Ancol Timur.

"Kenapa kita harus lakukan pembebasan lahan (Ancol Barat). Harga satu meter di situ itu berapa puluh juta dan yang mau dibebaskan berapa hektare," kata Pandapotan saat rapat kerja dengan PT MRT Jakarta pada Rabu (8/7).

Pandapotan mengatakan, saat ini PT Pembangunan Jaya Ancol telah mengantongi hak penggunaan lahan (HPL) di Ancol Timur. Dia meminta, kepada MRT agar berkoordinasi dengan Pembangunan Jaya Ancol untuk mengecek status hak guna bangunan (HGB) atas lahan di Ancol Timur. "Itu dicek

jangan-jangan tinggal setahun lagi (masa HGB), karena nanti (aset) bisa kembali kepada kita (Pemprov DKI Jakarta). Karena duit pembebasan lahan kan bisa dimanfaatkan untuk (infrastruktur MRT) beberapa meter," ujarnya.

Sementara, MRT menyebut berdasarkan kajian dari pihak konsultan, lokasi yang paling efektif dan efisien berada di Ancol Barat.

Selain itu, lokasi Ancol Timur juga lebih panjang 12 kilometer sehingga biaya pembangunan MRT trase II-A dan B bisa membengkak. Dirut PT MRT Jakarta, William Sbandar, mengatakan, lahan seluas 20 hektar waktu itu (Ancol Timur) juga tidak tersedia, yang ada lahan di Ancol Barat.

"Sebenarnya memang sudah siap untuk dibebaskan, cuma ada konsekuensi untuk pengadaaan lahan," ujar William. (faf)



WARTAWA